

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Tingkat Kemandirian, Efektivitas Penyerapan PAD, Temuan Audit SPI, Rasio Belanja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah daerah pada DI Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
3. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan Audit SPI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
4. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5. Secara simultan variabel dependen (opini audit laporan keuangan pemerintah daerah) dijelaskan oleh variabel independen (Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Temuan Audit dan Rasio Belanja Modal) sebesar 29,8% sedangkan sebesar 71,2% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Penyerapan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah meningkatkan Efektivitas Penyerapan PAD dan Rasio Belanja Modal serta mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan agar akuntabilitas keuangan pemerintah daerah meningkat.
2. Temuan Sistem pengendalian intern (SPI) agar temuan kelemahan SPI berkurang dan pemerintah daerah bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah menyebutkan bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK adalah efektivitas sistem pengendalian intern. Pernyataan tersebut dibuktikan pula dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan hasil terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan temuan SPI terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Rasio Belanja Modal. Dalam hal ini penekanan yang harus dilakukan pemerintah daerah tersebut adalah dengan menjadikan belanja belanja modal sebagai prioritas belanja. artinya, belanja modal dijadikan sebagai belanja yang harus dialokasikan terlebih dahulu secara matang dan tepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap menjadikan aturan-aturan daerah sebagai acuan pengalokasian belanja.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggunakan variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah serta menambah jangka waktu dan objek penelitian guna meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.